



» PILKADA 2024

## Perekrutan Badan Ad Hoc Segera Dimulai

UMBULHARJO—Perekrutan badan ad hoc penyelenggara Pilkada 2024 bakal dimulai Selasa (23/4). Kestabilan penyelenggara pemilihan di tingkat akar rumput itu menjadi sorotan dan tantangan bagi KPU untuk memastikan pilkada berjalan dengan jujur, adil dan bebas dari kepengingani.

Proses rekrutmen badan ad hoc pilkada yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlh) sama seperti Pemilu 2024, yakni dengan sistem terbuka lewat tahapan seleksi.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Sri Surani menyatakan pada 23 April pengumuman dan sosialisasi pendaftaran badan ad hoc Pilkada 2024 akan dimulai. Petugas badan ad hoc yang bekerja pada Pemilu 2024 bisa mendaftarkan diri kembali.

"Kebijakan itu diambil secara nasional. April mulai pendaftaran, dan Mei pembentukan PPK. Kami bentuk PPK dulu baru kemudian PPS," katanya, Jumat (19/5).

Metode seleksi yang dilakukan terhadap penerimaan badan ad hoc juga sama seperti Pemilu 2024, yakni dimulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi, tes tulis, tes wawancara, dan penetapan calon terpilih menjadi penyelenggara badan ad hoc. Mereka nantinya juga memakai SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc) serta tes *Computer Assisted Test* (CAT). "Total kebutuhannya lima orang per kecamatan atau kapanewon setiap kabupaten kota, sama seperti Pemilu 2024," katanya.

Menurut Rani, jajarannya memastikan proses rekrutmen badan ad hoc Pilkada tidak ada intervensi dan fenomena titip menitip calon. Ini bertujuan untuk memilih petugas yang benar-benar berintegritas dan menjunjung tinggi profesionalitas. Upaya ini juga merupakan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu 2024, baik secara lokal dan nasional di mana terdapat indikasi ketidaknetralan petugas penyelenggara. "Di DIY alhamdulillah tidak ada temuan badan ad hoc yang tidak netral," ujarnya.

Selain itu, kapasitas pengetahuan soal kepemilikan oleh anggota badan ad hoc juga menjadi catatan. Pasalnya, potensi eskalasi konflik yang terjadi pada pilkada diprediksi lebih besar dibandingkan Pemilu 2024. Untuk itu, KPU harus memastikan agar petugas yang terpilih benar-benar yang terbaik sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pilkada di akar rumput.

"Pilkada sangat rentan kepengingani, konfliknya pendek sehingga kami harus mampu mendapatkan seluruh penyelenggara pemilihan yang netral dan terbaik," ujar dia. (Yusuf Leon Piusker)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005